

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Wilayah perkotaan merupakan wilayah yang dikenal maju. Kemajuan dapat dilihat secara fisik, misalnya terdapat gedung tinggi yang megah, alat transportasi yang beragam, komoditas yang serba ada, dan lain sebagainya. Kemajuan dan kemegahan kota inilah yang sering menarik minat masyarakat desa untuk melakukan urbanisasi. Hal ini mengakibatkan wilayah perkotaan menjadi wilayah multifungsi. Wilayah perkotaan dapat menjadi daerah tempat tinggal (pemukiman), daerah industri, pusat kegiatan ekonomi, sekaligus pusat pemerintahan dan administrasi. Karenanya, perkotaan seringkali memiliki masalah-masalah sosial yang kompleks. Misalnya, permasalahan tata ruang, ekologi, kemiskinan, kemacetan, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Masyarakatnya yang heterogen juga kerap kali menimbulkan masalah persaingan dan konflik kepentingan. Masalah perkotaan sendiri dapat diklasifikasikan pada dua jenis, yakni masalah informal dan masalah formal. Masalah formal adalah masalah yang berkaitan dengan sektor formal, misalnya pemerintahan. Masalah informal berkaitan dengan sektor informal, misalnya pedagang kaki lima (Jamaluddin, 2015: 32).

Masalah informal merupakan jenis masalah yang sulit terlepas dari wilayah perkotaan. Hal ini disampaikan oleh *global report on human settlement* (2009:13) mereka menjelaskan bahwa masalah informal perkotaan sangat berkaitan dengan pembangunan perkotaan yang sifatnya tidak berkelanjutan (*unsustainable for*

*development*). Pembangunan yang tidak berkelanjutan berkaitan dengan pengelolaan tata ruang kota pada wilayah pemukiman, wilayah terbuka hijau, wilayah perekonomian, dan lainnya.

Keberadaan Pedagang kaki lima banyak mengundang pro dan kontra, pandangan pro menganggap PKL sebagai *origin of self employment* yang merangsang tumbuhnya kewiraswastaan masyarakat lokal dan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi perkotaan. Namun dipihak kontra, PKL dianggap sebagai penyakit yang membuat kota menjadi tidak teratur, bahkan terkesan kotor atau kumuh (Sulistyo, 2013: 32).

Pertumbuhan dan tingkat urbanisasi yang tinggi semakin memperparah masalah pada sektor informal. Kepadatan penduduk terutama paling berpengaruh pada wilayah pemukiman dan aktivitas perekonomian informal. Akibatnya, banyak wilayah perkotaan yang terkesan kumuh dengan aktivitas ekonomi yang tidak sah. Aktivitas ekonomi yang tidak sah (informal) menurut Hart dan de Soto (1997 : 159-160) merupakan kegiatan pencarian kebutuhan yang berskala kecil dan tidak resmi (usaha kecil). Adanya usaha kecil di daerah perkotaan disebabkan oleh dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena persaingan perkotaan yang cukup ketat, maka kelompok yang tidak dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan memilih untuk membuka usaha kecil pada sektor informal. Salah satunya adalah dengan berdagang dengan cara membuka lapak pada area-area yang banyak dilalui, seperti jalan raya, terminal, sekolah, dan lain sebagainya. Jenis pedagang ini kemudian disebut pedagang kaki lima (PKL) (Rostiena dkk, 2019: 8).

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan masalah informal yang mengganggu ketertiban perkotaan. Hal ini dikarenakan PKL menimbulkan masalah bagi perkotaan, misalnya kemacetan, lingkungan kumuh, dan lain sebagainya. Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah melakukan langkah solutif dengan cara mengeluarkan kebijakan relokasi. Salah satu strategi pengorganisasian dan pengelolaan PKL yang dapat menguntungkan semua pihak yakni, pedagang, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan adalah relokasi PKL. Relokasi adalah upaya untuk menggeser sesuatu dari satu lokasi ke lokasi yang dianggap lebih baik. Lokasi dan kualitas lokasi tempat baru harus menjadi pertimbangan saat mengeluarkan kebijakan relokasi, karena akan berdampak pada peluang pasar, jejaring sosial, dan

akses bisnis (Reynaldo, 2021: 6). Namun, bagi PKL relokasi terkadang justru merugikan mereka. Hal ini dikarenakan lokasi relokasi kadang kurang strategis daripada sebelumnya. Lokasi dagang yang terpusat pada satu daerah tertentu menjadikan para PKL kesulitan menentukan jenis pembeli, sehingga setelah relokasi, PKL justru sepi pelanggan. Misalnya, untuk PKL yang menjual jajanan atau mainan bagi anak sekolah akan kesulitan mendapatkan pelanggan apabila berada di lokasi yang jauh dari sekolah dan cenderung dilalui orang dewasa.

Pertimbangan-pertimbangan akan kerugian material menjadi salah satu alasan keengganan para PKL untuk direlokasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, di satu sisi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kemacetan dan tata ruang kota yang semrawut karena maraknya pedagang kaki lima di bahu jalan. Di sisi lain, pembangunan gedung dan kebijakan relokasi justru merugikan pedagang kaki lima (PKL) secara ekonomi. Akibat faktor ekonomi, para PKL menolak direlokasi dan mengakibatkan masalah kemacetan berlanjut, dan gedung PKL terbengkalai. Berdasarkan informasi dari beberapa berita di laman *website*, faktor-faktor keengganan para PKL untuk direlokasi adalah sebagai berikut:

1. Lokasi relokasi jarang dikunjungi oleh pembeli, sehingga pendapatan berkurang.
2. Pembeli belum mendapatkan sosialisasi yang maksimal, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa PKL direlokasi.

Masalah kegagalan relokasi PKL salah satunya terjadi di Gedung PKL Intan Medina, Kabupaten Garut. Kabupaten Garut merupakan salah satu wilayah yang memiliki masalah PKL yang cukup tinggi. Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut sempat melaporkan angka PKL di Kabupaten Garut sebelum pandemi berlangsung, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Data PKL di Kabupaten Garut Sebelum Pandemi**

| No | Sektor  | Jumlah |
|----|---|--------|
| 1  | Alun-alun Kabupaten Garut   | 63     |
| 2  | Sektor Siliwangi 1, dari Jalan Dewi Sartika sampai RM. Ampera     | 125    |
| 3  | Sektor Siliwangi 2, dari Belokan TELKOM sampai Jalan Muhammadiyah | 96     |

|       |   |      |
|-------|---|------|
| 4     | Sektor Jalan Cikuray  | 56   |
| 5     | Sektor Jalan Ciledug 1, dari Toko Besi sampai Toko Cahaya Agung               | 9    |
| 6     | Sektor Jalan Ciledug 2, dari Gunung Putri sampai RM Bunga Tanjung             | 97   |
| 7     | Sektor Jalan Ahmad Yani 1, dari Ciwalen sampai Pasar Baru                     | 123  |
| 8     | Sektor Jalan Ahmad Yani 2, dari Belokan Mas Rohmat sampai Belokan Mandalagiri | 107  |
| 9     | Sektor Jalan Ahmad Yani 3, dari Toko Julung sampai Asia Toserba               | 143  |
| 10    | Sektor Jalan Ahmad Yani 4, dari Toko Liong sampai BNI-Wansamin                | 86   |
| 11    | Jalan Pasar Baru A sampai F   | 295  |
| 12    | Sektor Jalan Mandalagiri, dari Belokan Mandalagiri sampai Belokan Darekdok    | 161  |
| Total |   | 1448 |

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut 2017-2019

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa Garut merupakan salah satu Kota dengan jumlah PKL yang tinggi. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Garut mengambil kebijakan pembangunan gedung PKL dan relokasi PKL. Hal ini ditujukan agar tata ruang Garut Kota lebih rapi dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Garut berencana untuk mengubah sebidang tanah di Jalan Guntur menjadi pusat kegiatan PKL, dengan cara menata dan membangunnya. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mempromosikan wisata kuliner di wilayah tersebut. Harapannya, jika diatur dengan matang, maka akan digunakan untuk menambah daya tarik bagi Kecamatan Garut Kota dan sebagai potensi wisata, sehingga meningkatkan situasi ekonomi para pedagang dan pemerintah Garut Kota. Para PKL yang awalnya berdagang di pinggir trotoar akan direlokasi ke gedung yang telah disediakan nantinya (Rostiena dkk, 2019: 9).

Rencana pembangunan dan relokasi PKL di Garut Kota tidak berjalan sesuai rencana awal. Rencana ini justru mendulang respon negatif dari para PKL. Mereka menolak untuk direlokasi dengan berbagai alasan, utamanya adalah alasan pendapatan dan ekonomi. Akibatnya, muncul masalah-masalah lain bagi Garut Kota. Salah satunya adalah gedung PKL yang terbengkalai digunakan sebagai

tempat mesum oleh sebagian warga. Supriadin melaporkan bahwa gedung PKL yang dibangun pemerintah Kabupaten Garut sudah kosong selama tiga tahun. Gedung tersebut saat ini terbengkalai dan sudah mulai rusak. Kerusakan ini berdampak pada munculnya kawasan kumuh di Kecamatan Garut Kota. Sebagian orang, justru memanfaatkan gedung ini sebagai tempat mesum. Peneliti meyakini bahwa kegagalan relokasi PKL ke gedung baru tidak hanya menimbulkan masalah berupa munculnya kawasan kumuh dan aktivitas mesum saja, melainkan terdapat dampak sosial lainnya yang merugikan masyarakat. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengkaji topik ini melalui penelitian ini.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa inti masalah mengenai kegagalan relokasi ke Gedung PKL Intan Medina. Adapun identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan PKL di Kabupaten Garut yang tinggi menyebabkan tata ruang Kabupaten Garut semrawut dan kurang memiliki estetika yang baik. Hal ini membutuhkan penyelesaian dari pemerintah, melalui kebijakan pembangunan Kota yang berkelanjutan.
2. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembangunan gedung PKL di wilayah Jalan Guntur dan merelokasi PKL ke wilayah tersebut.
3. Rencana relokasi PKL ke Jalan Guntur tidak direspon positif oleh para PKL karena alasan pengurangan pendapatan, akibatnya muncul dampak-dampak sosial yang dapat merugikan masyarakat umum.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan beberapa pertanyaan penelitian. Adapun beberapa pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor kegagalan relokasi Pedagang kaki lima (PKL) di Gedung PKL Intan Medina Kabupaten Garut?

2. Apa dampak sosial ekonomi yang terjadi akibat gagalnya relokasi Pedagang kaki lima di Gedung PKL Intan Medina Kabupaten Garut?
3. Bagaimana penanggulangan kegagalan relokasi Pedagang kaki lima (PKL) di Gedung PKL Intan Medina Kabupaten Garut?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada pertanyaan penelitian di atas, peneliti merumuskan beberapa tujuan dalam penelitian ini. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan keengganan para PKL untuk direlokasi, sehingga menyebabkan kegagalan pada kebijakan relokasi PKL oleh pemerintah Kabupaten Garut.
2. Untuk menganalisis dampak sosial ekonomi bagi masyarakat umum yang menjadi efek dari kegagalan kebijakan relokasi PKL di Kabupaten Garut.
3. Untuk menganalisis dan mengevaluasi upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah terkait dengan kegagalan kebijakan relokasi PKL di Kabupaten Garut.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Suatu penelitian tentu akan berguna bagi beberapa pihak. Penelitian dapat digunakan secara keilmuan (teoritis), atau digunakan secara praktis. Kegunaan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis yaitu melalui teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Adapun beberapa manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang Sosial secara teoritis maupun praktis, serta sebagai bahan untuk menerapkan dan memabndingan pengetahuan yang diperoleh penulis secara teori dan kenyataan dilapangan.

## 2. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan koreksi bagi Pemerintah Daerah, agar mampu melaksanakan kebijakan penertiban PKL lebih baik lagi.

## 3. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Penelitian ini dapat memperoleh koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya mahasiswa program studi Sosiologi.

### 1.6 Kerangka Pemikiran

PKL merupakan usaha sektor informal yang tak jarang menimbulkan masalah di perkotaan. Keberadaan PKL dianggap telah mengganggu ketertiban dan kebersihan kota. Begitu pula dengan PKL yang berada di Kabupaten Garut, di satu sisi PKL sangat membantu masyarakat sekitar untuk memenuhi beberapa kebutuhan primer seperti sandang , pangan dan kebutuhan lain yang disediakan oleh para PKL. Di sisi lain, PKL dipandang sebagai penyakit kota. Keberadaan mereka di fasilitas umum dan fasilitas sosial dinilai merusak estetika kota. Kondisi ini akan berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Terkait realitas kebijakan tentang tempat usaha bagi pedangan kaki lima Kabupaten Garut pada dasarnya sudah tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, mengenai Ketertiban Jalan, Jalur Hijau dan trotoar pasal 8 (a) yang berbunyi “Setiap orang dilarang, menggunakan bagian jalan, jalur hijau dan trotoar yang tidak sesuai dengan peruntukannya” dan pasal 8 (j) yang berbunyi “Setiap orang dilarang, menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan”.

Keputusan Bupati Garut mengeluarkan keputusan Nomor 511.3/Kep.80- DP2ESDM/2017 tentang penetapan lokasi sementara bagi kegiatan usaha pedangang kaki lima di wilayah Garut Kota.

Surat keputusan ini di keluarkan dan di tetapkan bertujuan agar para pedagang kaki lima melakukan aktifitas perdagangan sesuai dengan titik – titik yang sudah ditentukan. Hubungan antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan PKL bersifat vertikal. Artinya sebagai penguasa dan pemegang kekuasaan di posisi paling tinggi, pada hal ini Pemerintah Kabupaten Garut memiliki otoritas guna mengatur masyarakat Kabupaten Gaurt melalui kebijakan yang dibentuk serta sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Setiap kebijakan yang diterapkan memiliki dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak terduga (Wibawa,1994: 53-59). Demikian juga dengan dampak relokasi PKL yang terdapat di Kabupaten Garut. Meskipun sudah dilakukan penataan beberapa kali pada beberapa tahun terakhir, tetapi masih besar masalah yang menyelimuti. Misalnya PKL yang tetap dalam pendiriannya guna berdagang ditempat yang bukan seharusnya, yang tentunya bertentangan dengan kebijakan yang berlangsung dan gedung relokasi yang tidak terawat. Pasti itu bukan sebuah *output* yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut, lantaran efek yang terjadi tidak sinkron atas segala yang dinantikan awalnya.

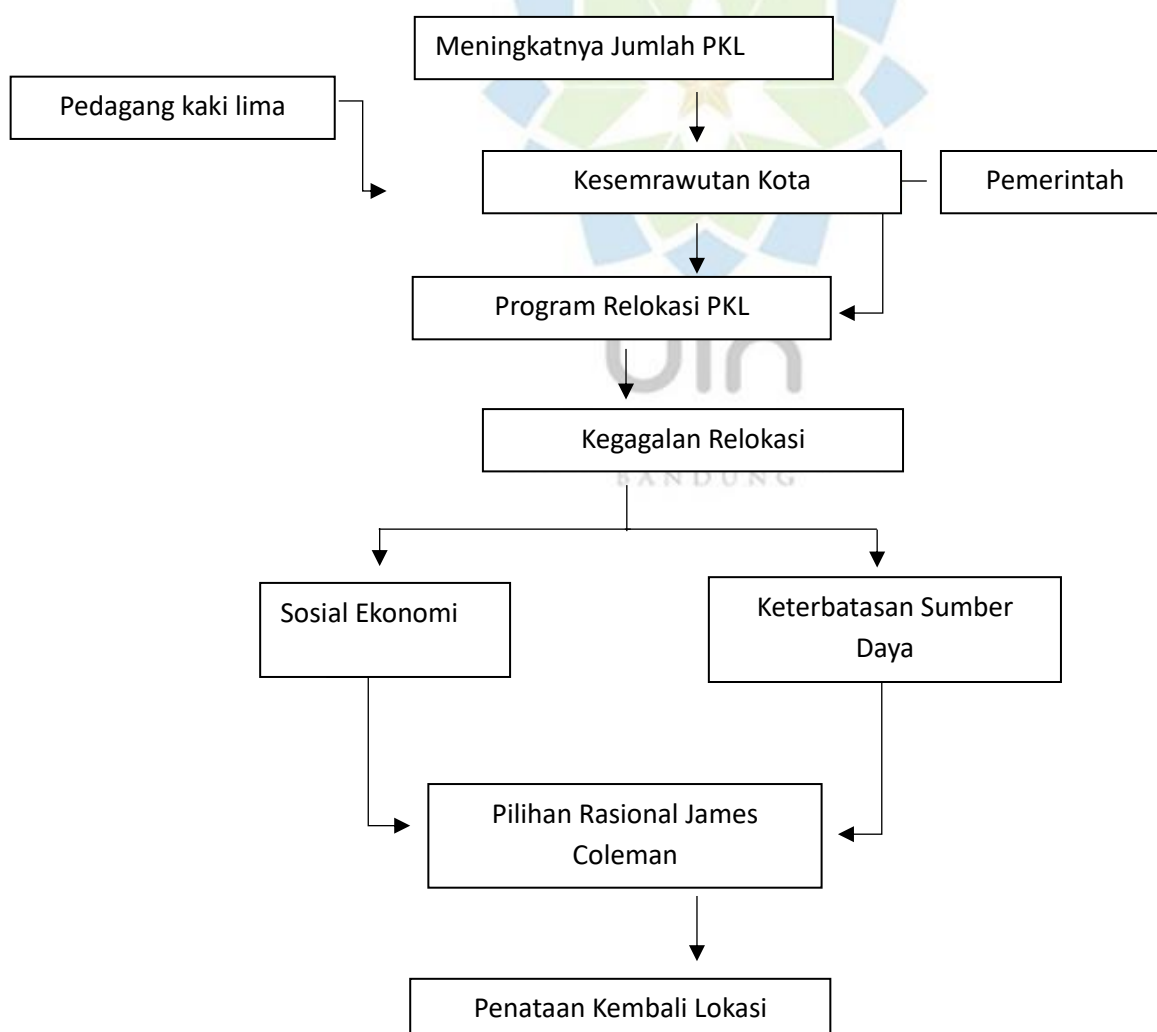
Diamati berdasarkan perihal tersebut, jika pengenalan mengenai kebijakan itu berjalan lancar seperti mendapat pesan yang dapat dipahami oleh pedagang serta sikap PKL yang setuju berafiliasi dengan memenuhi kebijakan, pasti memiliki dampak positif untuk kesuksesan strategi penertiban tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa masih perlu adanya evaluasi guna mengetahui apakah kebijakan tersebut telah mencapai hasil yang diinginkan sehingga dapat dijadikan kritik terhadap kebijakan yang diimplementasikan dan diketahui dampak yang timbul.

Peneliti menggunakan teori pilihan rasional dari James S. Coleman prefensi (Ritzer dan Goodman, 2008:394) mendefinisikan teori Pilihan Rasional sebagai tindakan rasional yang dilakukan oleh individual atau aktor untuk melakukan suatu Tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan tersebut ditentukan oleh nilai atau prefensi. Teori pilihan rasional memfokuskan perhatiannya pada aspek individual atau actor yang diartikan sebagai manusia yang memiliki maksud dan tujuan. Dengan



kata lain, aktor melakukan Tindakan – Tindakan yang tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Teori pilihan rasional sebagai landasan tingkat mikro untuk menjelaskan fenomena pada tingkat makro.

Hasil dari penelitian yang mendalam, penelitian ini berencana untuk menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Untuk lebih memahami realitas sosial, terkhusus pada sikap dan perilaku, keyakinan, dan motivasi mereka, maka penggunaan pendekatan kualitatif merupakan teknik penelitian yang tepat untuk digunakan. Pendekatan kualitatif menganalisis data dengan cara menganalisis informasi yang tidak dapat direduksi menjadi serangkaian angka. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif cocok untuk diterapkan dalam penelitian ini. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui skema berikut ini:



**Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Teori Pilihan Rasionalitas Coleman**

Di dalam teori pilihan rasional terdiri dari dua unsur penting yaitu aktor dan sumber daya. Keduanya berkaitan pertama aktor yang memiliki kepetingan untuk mencapai tujuannya dalam hal ini untuk mengatasi kemiskinan. Sedangkan sumber daya merupakan sesuatu yang menarik bagi aktor untuk dikontrol oleh aktor. Sumber daya yang dimiliki oleh PKL seperti permintaan pelanggan yang mereka miliki, modal dan sebagainya. Namun sumber daya tersebut dipengaruhi oleh sistem sosial baik itu yaitu pemerintah.

Disaat sistem sosial tidak bisa menampung sumber daya yang aktor punya. Akhirnya pada saat aktor tidak punya pilihan lain untuk menuju kepetingannya, akhirnya aktor tersebut melakukan suatu pilihan yang mereka anggap rasional.

### 1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai perbandingan serta untuk membantu peneliti menentukan ruang lingkup dan tujuan penelitian yang ada, peneliti akan menggunakan penelitian terdahulu pada topik yang serupa atau memiliki tujuan yang sama. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat menjadi acuan untuk tujuan memperluas hipotesis yang akan diselidiki, sehingga akan sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Peneliti juga ingin meminimalisir kemungkinan tumpang tindih dengan penelitian lain.

- 1) Rostiena Paciana, Pupung Pundenswari, dan Gina Sadrina (2019) melakukan penelitian untuk jurnal Relokasi Pedagang kaki lima (PKL) untuk Memperindah Kabupaten Garut pada tahun 2019. Penelitian ini mengkaji kebijakan program relokasi PKL Kabupaten Garut sebagai sarana pembentukan hukum dan ketertiban di wilayah zona merah Kabupaten Garut. Penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif dan deskriptif. Kajian pustaka dan investigasi lapangan dengan keterlibatan peserta yang minim memberikan data. Untuk teknik pengumpulan sampel, dikenal dengan *purposive sampling*. Kebijakan pemerintah tentang relokasi PKL di Kabupaten Garut tidak

berhasil dilakukan. Persamaan dengan penelitian ini adalah memiliki lokasi penelitian yang sama di gedung PKL Garut dan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Perbedaannya penelitian ini fokus pada kebijakan program pemerintah dalam relokasi PKL di Garut Kota, sedangkan fokus peneliti terhadap dampak sosial ekonomi para pedagang kaki lima (PKL) yang enggan menempati gedung PKL yang telah disediakan dan kembali berjualan di tempat semula.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Rianto Wibowo (2006) berjudul Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Relokasi Pedagang kaki lima Ditinjau Dari Perspektif Pedagang. Pemerintah Kota Bandung berusaha merelokasi pedagang kaki lima dari kawasan Jalan Arjuna ke Pasar Ciroyom, namun rencana tersebut menemui banyak tantangan dan kemunduran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan dari sudut pandang PKL. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat profil PKL, mengkaji sikap PKL terhadap relokasi, dan menganalisis alasan PKL mengapa mereka lebih memilih untuk tetap berjualan di Jalan Arjuna daripada di Pasar Ciroyom yang disediakan pemerintah. Tabulasi silang adalah teknik statistik yang digunakan untuk memeriksa hubungan antara beberapa variabel.

Studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar PKL menentang inisiatif relokasi pemerintah. Selain itu, PKL tidak diikut sertakan terlibat oleh pemerintah sejak awal. Karenanya, PKL lebih memilih untuk terus berjualan di Jalan Arjuna karena mereka percaya bahwa memindahkan lokasi penjualan akan menghasilkan lebih sedikit kesempatan untuk menjual kepada konsumen dan tidak akan sebanding dengan biaya operasional mereka sehubungan dengan omset yang mereka capai. Terjadinya upaya relokasi yang gagal yang berdampak pada pembangunan yang terbengkalai merupakan persamaan pola dalam penelitian Wibowo (2006) dengan penelitian ini. Perbedaannya

sendiri dapat dibedakan melalui kurun waktu (tahun penelitian) dan tempat penelitian ini dilakukan.

- 3) Penelitian Fitria Rahmawati (2014) Program Relokasi PKL di Sekitar Stadion Tambaksari Surabaya ke Pasar Krampung. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor kegagalan program relokasi PKL di sekitar Stadion Tambaksari Surabaya. Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Metode bola salju (*snowball sampling*) digunakan untuk memilih informan dan data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam, serta untuk mendapatkan sumber data dan dokumen.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program relokasi belum berhasil. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa program ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, khususnya tujuan relokasi masih memiliki kekurangan bagi para pedagang, yang mengakibatkan penurunan pendapatan. Selain itu, pengaruh kelompok yang memaksa para pedagang untuk terus berjualan di lokasi yang sama di mana mereka sebelumnya.